

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN LUNANG TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN LUNANG
TAHUN 2025**



**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, OPD Kecamatan Lunang telah menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan OPD Kecamatan Lunang, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, Amiin.

Lunang, 22 September 2025

Plt. CAMAT LUNANG



SYAMWIL, SSTP, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19820113 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1 Latar Belakang 1
	1.2 Landasan Hukum 2
	1.3 Maksud dan Tujuan 4
	1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Lunang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 18
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja 19
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 26
	3.3 Program Dan Kegiatan 32
BAB IV	RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42
BAB V	PENUTUP 47
LAMPIRAN		48

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pesisir selatan	9
Tabel E.81	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan	12
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	17
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan	25
Tabel T-C.33	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	31
Tabel T-C.34	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Renja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	36
Tabel T-C.35	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam operasionalisasinya. Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam operasionalisasinya di lapangan. Rencana kerja Kecamatan Lunang tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis berbasis kinerja, dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

1. Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu
2. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
3. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
4. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya
5. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:
 - a. Transparatif dan akuntabilitas dalam perencanaan,
 - b. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah,

- c. Berperan aktif pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselenggarakan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

- 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 11. Pedoman Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
18. Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Strategis Kecamatan Lunang Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja OPD Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Kecamatan Lunang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Lunang Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Lunang Tahun 2025;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Lunang, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian simpulan, catatan penting, dan rencana tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dijabarkan.

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Lunang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, diketahui bahwa capaian kinerja program dan kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Beberapa kegiatan telah mulai direalisasikan, khususnya yang bersifat non-fisik dan persiapan administrasi, sementara kegiatan fisik sebagian besar masih dalam proses perencanaan atau pengadaan. Kendala utama yang dihadapi antara lain terkait dengan keterlambatan penyesuaian anggaran, proses administrasi, serta koordinasi lintas sektor. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Renja Perubahan agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih realistis, adaptif terhadap kondisi aktual, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lunang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 berikut.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/ (Output)	Target Kinerja Renstra Kec. Lunang pada Periode Tahun 2021 s.d 2026		Capaian Kinerja Renstra Kec. Lunang Sampai Dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (Pergeseran/Efisiensi)		Realisasi Kinerja Kec. Lunang Per Triwulan Tahun Anggaran 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kec. Lunang s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Kec. Lunang s/d Tahun 2025 (%)	
				5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (6 +12)		14 = 13/5*100	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	8.954.795.565	60	4.525.231.625	20	1.620.654.317	5	424.426.934	5	184.920.994	10	609.347.928	70	5.134.579.553	70,00	57,34
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kantor	100	75.000.000	57	24.253.000	20	-	-	-	-	-	-	57	24.253.000	57,00	32,34	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia (dokumen)	85	75.000.000	44	24.253.000	12	-	-	-	-	-	-	44	24.253.000	51,76	32,34	
	Administrasi Keuangan		Persentase tersedianya Administrasi Keuangan Kantor	100	6.678.795.565	60	3.541.090.054	20	1.288.354.154	6	320.805.862	6	175.929.581	12	496.735.443	72	4.037.825.497	72,00	60,46
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan (bulan)	70	6.450.795.565	42	3.426.159.151	14	1.234.189.154	3	313.525.862	3	174.624.581	6	488.150.443	48	3.914.309.594	68,57	60,68



		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)	60	228.000.000	36	114.930.903	12	54.165.000	3	7.280.000	3	1.305.000	6	8.585.000	42	123.515.903	70,00	54,17
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Kantor	100	1.476.000.000	60	619.779.283	20	197.288.162	5	69.168.200	5	7.330.500	10	76.498.700	70	696.277.983	70,00	47,17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan (bulan)	60	65.000.000	33	7.668.600	12	1.080.585	3	261.000	3		6	261.000	39	7.929.600	65,00	12,20
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	100.000.000	4	62.664.000	4	32.967.440	3	12.835.000	3		6	12.835.000	10	75.499.000	100,00	75,50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	60	180.000.000	33	57.381.800	12	15.240.300	3	3.801.500	3	975.000	6	4.776.500	39	62.158.300	65,00	34,53
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	60	75.000.000	34	22.596.100	12	4.510.000	3	1.127.200	3	692.500	6	1.819.700	40	24.415.800	66,67	32,55
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (buah)	60	6.000.000	24	1.200.000	12	-		-	-	-	-	-	24	1.200.000	40,00	20,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu (bulan)	60	200.000.000	27	86.240	12	-		-	-	-	-	-	27	862.400	45,00	0,43
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (dokumen)	60	850.000.000	36	467.406.383	12	143.489.837	3	51.143.500	3	5.663.000	6	56.806.500	42	524.212.883	70,00	61,67
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	100	350.000.000	61	156.168.088	20	62.700.000	5	14.152.872	5	1.660.913	10	15.813.785	71	171.981.873	71,00	49,14
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah bulan tagihan air (PDAM),	60	50.000.000	36	18.331.812	12	12.600.000	3	2.152.872	3	1.030.025	6	3.182.897	42	21.514.709	70,00	43,03



		Daya Air, dan Listrik	PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan (bulan)																
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	60	300.000.000	36	137.836.276	12	50.100.000	3	12.000.000	3	630.888	6	12.630.888	42	150.467.164	70,00	50,16
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	100	375.000.000	55	183.941.200	20	72.312.001	28	20.300.000	-	-	28	20.300.000	83	204.241.200	83,07	54,46
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	2	150.000.000	2	94.229.200	2	38.704.001	2	12.550.000	-	-	2	12.550.000	2	106.779.200	100,00	71,19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (paket)	60	60.000.000	24	5.050.000	3	7.400.000	2	2.750.000	-	-	2	2.750.000	26	7.800.000	43,33	13,00
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	165.000.000	2	84.662.000	2	26.208.000	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000	2	89.662.000	100,00	54,34
2	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang ditangani	100	275.000.000	40	51.833.850	0	19.068.000	1	6.468.000	1	-	2	6.468.000	42	58.301.850	42,00	21,20



		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	275.000.000	40	51.833.850	0	19.068.000	1	6.468.000	1	-	2	6.468.000	42	58.301.850	42,00	21,20
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan urusan pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	3	275.000.000	3	51.833.850	2	19.068.000	1	6.468.000	-		1	6.468.000	4	58.301.850	133,33	21,20
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	400.000.000	57	117.683.000	20	19.560.000	15	5.150.000	15	1.317.500	30	6.467.500	87	124.150.500	87,00	31,04
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	300.000.000	55	102.355.000	20	19.560.000	5	5.150.000	5	1.317.500	10	6.467.500	65	108.822.500	65,00	36,27
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Nagari)	10	100.000.000	10	17.690.000	10	5.150.000	10	5.150.000	-	-	10	5.150.000	10	22.840.000	100,00	22,84
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga pemberdayaan masyarakat yang di bina	25	200.000.000	6	84.665.000	7	14.410.000	-	-	2	1.317.500	2	1.317.500	8	85.982.500	32,00	42,99



		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100.000.000	20	15.328.000	20	-	-	-	-	-	-	20	15.328.000	20,00	15,33
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	14	100.000.000	2	15.328.000	4	-	-	-	-	-	-	2	15.328.000	14,29	15,33
4	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	290.000.000	65	83.642.500	20	40.170.000	-	-	-	-	-	65	83.642.500	65,00	28,84
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	290.000.000	60	83.642.500	20	40.170.000	-	-	-	-	-	60	83.642.500	60,00	28,84
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan PHBN (kali)	5	190.000.000	3	71.292.500	1	34.590.000	-	-	-	-	-	3	71.292.500	60,00	37,52
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (bulan)	60	100.000.000	36	12.350.000	12	5.580.000	-	-	-	-	-	36	12.350.000	60,00	12,35
5	erwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TATA PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	95.000.000	20	7.850.000	0	0	0	0	0	0	-	20	7.850.000	20,00	8,26



		Fasilitasi , rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi , rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	10 0	95.000.000	20	7.850.000	0	0	0	0	0	0	-	-	20	7.850.000	20,0 0	8,26
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik (nagari)	10	95.000.000	10	7.850.000	0	-	0	0	0	0	-	-	1 0	7.850.000	100,0 0	8,26
JUMLAH				50 0	10.014.795.565	242	4.786.240.975	60	1.699.452.317	2 0	436.044.934	2 0	186.238.494	40	622.283.428	28 2	5.408.524.403	56,40	54,01

Berdasarkan Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Lunang sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025, berikut analisis dari tabel tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, seluruh kegiatan terserap dengan baik sesuai dengan pagu yang di anggarkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdapat 1 (satu) Kegiatan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan. Dimana 1 Sub Kegiatan telah terserap 100% sementara 1 Sub Kegiatan Lainnya belum terlaksana.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh Kegiatan belum terlaksana.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seluruh Kegiatan terserap dengan baik sesuai dengan pagu anggaran yang dianggarkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lunang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja Pelayanan di OPD Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Peningkatan dan perwujudan ketentraman dan ketertiban.
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan msyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

5. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas/instansi yang berada di wilayah kecamatan Lunang maupun pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan
4. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari
5. Melaksanakan musrenbang kecamatan dan memfasilitasi musrenbang nagari.
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
7. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Nagari
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel T-C.30
Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Lunang

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	BB (79,2)	BB (79,2)	BB (79,2)	BB (78,86)	B (63,72)	N/A	BB (79,2)	BB (79,2)
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	85%	87	87	80%	85,45	N/A	87	87
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	-	75	75	75	45	51	N/A	75	75
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Nagari	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	10 Nagari	75%	100%	100%	10 Nagari	100%	N/A	100%	100%
		Angka Kemiskinan Ekstrem	-	0%	0%	0%	-	0%	N/A	0%	0%
		Prevalensi Stunting (EFPGBM)	-	2,51%	5,00%	5,00%	-	4,88%	N/A	5,00%	5,00%
5	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	-	80%	100%	100%	-	100,00%	N/A	100%	100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Lunang adalah :
 - a. Kurangnya SDM Sehingga dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi harus merangkap dengan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tupoksinya,
 - b. Masing – masing Pejabat Struktural baik Kasi maupun Kasubag tidak memiliki Staf yang cukup.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah .

Tantangan :

- a. Memetakan Mitigasi Resiko Sehingga Pengendalian Resiko Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software– hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan.
- d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada.
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan.

- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan.
 - d. Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Lunang terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa serta.
 5. Program – program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui Perubahan Anggaran Kegiatan.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2025

Dalam Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Lunang Tahun 2025 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut :



Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RENJA Tahun 2025
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Lunang

No	Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	DPA 2025 (Rp)	Pergeseran 2025 (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	1.736.889.154	1.620.654.317	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	1.633.254.317	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	-	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 dokumen	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 dokumen	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi keuangan kantor	12 bulan	1.277.869.154	1.288.354.154	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi keuangan kantor	12 bulan	1.288.354.154	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.234.189.154	1.234.189.154	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.234.189.154	
	Penyediaan	Kecamatan	Jumlah dokumen hasil	12 bulan		54.165.	Penyediaan	Kecamatan	Jumlah dokumen hasil	12 bulan	54.165.	



	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lunang	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		43.680.000	000	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lunang	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi umum kantor		324.012.000	197.288.162	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya administrasi umum kantor	0	223.488.162	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	1.080.585	1.080.585	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	1.080.585	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	32.967.440	32.967.440	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	32.967.440	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	15.240.300	15.240.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	15.240.300	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	4.510.000	4.510.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	4.510.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan-undangan yang disediakan	12 dokumen	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan-undangan yang disediakan	12 dokumen	-	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	-	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	270.213.675	143.489.837	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	169.689.837	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	62.700.000	62.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	59.100.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12.600.000	12.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	9.000.000	



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	50.100.000	50.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	50.100.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	72.308.000	72.312.001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	62.312.001	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	38.700.000	38.704.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	28.704.001	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	7.400.000	7.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	7.400.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	26.208.000	26.208.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	26.208.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	85%	22.500.000	19.068.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang		85%	6.468.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 bulan	22.500.000	19.068.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 bulan	6.468.000	



	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	10 kali	22.500.000	19.068.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	10 kali	6.468.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	100 %	33.860.000	19.560.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	100 %	19.560.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	33.860.000	19.560.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	19.560.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas	50 usulan	5.150.000	5.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	50 usulan	5.150.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	28.710.000	14.410.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	14.410.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lunang	Terujudnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan	12 bulan	-	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lunang	Terujudnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan	12 bulan	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lunang	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina	10 Lembaga	-	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lunang	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina	10 Lembaga	-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	40.940.000	40.170.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	40.170.000



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	40.940.000	40.170.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	40.170.000	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	30 orang	34.590.000	34.590.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	30 orang	34.590.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	6.350.000	5.580.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	5.580.000	
Jumlah				1.834.189.154	1.699.452.317	Jumlah				1.699.452.317	



1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lunang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Lunang adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

1.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029. Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 adalah:

"PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN"

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang unggul. Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak adalah komitmen untuk

membangun individu yang tidak hanya memiliki tubuh yang sehat, tetapi juga memiliki kecerdasan intelektual serta moral yang tinggi.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, dan berakhlak menjadi prioritas dalam meningkatkan daya saing serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pembentukan karakter, diharapkan terwujud SDM yang tidak hanya unggul dalam intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan kuat dalam nilai-nilai moral. Dengan demikian, mereka akan menjadi pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis

4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif

Perwujudan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan

bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Pesisir Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan urusan Kewilayahan/Kecamatan adalah misi kesatu yakni :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.”

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2025 yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
- b. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
- c. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Tabel T-C. 33

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi	Persentase Capaian Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Evaluasi SAKIP oleh Inspekda Kab. Pessel	BB (79,2)
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey IKM	87
				Nilai Kematangan Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi IGA	75
			Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari	Persentase Nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik	Jumlah Nagari dengan Tata Kelola pemerintahan yang Baik	100%
				Angka Kemiskinan ekstrim	Indeks Kemiskinan	0%
				Prevalensi stunting (EPPGBM)	Indeks Prevalensi Stunting	5,00%
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	Jumlah Konflik yang dilaporkan / Jumlah Konflik yang diselesaikan	100%

a. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Perubahan Renja 2025 ini yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2025:

Jumlah Program : 4 (empat)

Jumlah Kegiatan : 8 (delapan)

Jumlah Sub Kegiatan : 18 (delapan belas)

Pagu APBD setelah pengeseran : Rp **1.699.452.317,-** (*satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*)

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran , dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan tentang penyusunan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan serta Dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan kantor, dengan sub kegiatan terdiri dari :

a. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Merupakan sub kegiatan untuk menyusun Dokumen Evaluasi dan pelaporan seperti evaluasi RKPD, LPPD dan sebagainya.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan tentang Anggaran Keuangan Kantor, dengan sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan sub kegiatan khusus untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan kantor.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Merupakan sub kegiatan yang berisikan pembayaran honor pengelola keuangan kantor.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan pelayanan dasar perkantoran yang terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti :

a. Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor seperti Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar dan battery kering).

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi sarana dan prasarana kantor seperti pengadaan komputer, laptop dan lainnya.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Alat Tulis Kantor, Terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Materai dan benda pos lain nya

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan pengadaan kantor ,terdiri dari :

- Belanja Cetak
- Belanja pengadaan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Operasional Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan memenuhi kebutuhan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta rapat-rapat yang bersifat rutin yang diselenggarakan oleh kecamatan.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor serta honorarium tenaga harian lepas dengan sub kegiatannya seperti berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan sub kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik untuk kantor. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bermanfaat dalam penyediaan kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari :

- Belanja Honorarium pegawai Honorer/tidak tetap
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

G. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan mengenai pemeliharaan barang milik daerah yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, rumah dinas, kantor camat, peralatan dan mesin serta sarana dan prasarana kantor yang sub kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Merupakan sub kegiatan yang berisikan pemeliharaan rutin dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan serta penyediaan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD secara berkala yang terdiri dari :

- Belanja jasa servis Komputer PC atau Laptop dan Printer
- Belanja penggantian suku cadang Komputer PC atau Laptop dan Printer.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk kebutuhan memenuhi secara berkala Gedung kantor dengan ketersediaan, Terdiri dari :

- Belanja bahan baku bangunan
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Belanja jasa pihak ketiga

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Merupakan program yang bertujuan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Merupakan kegiatan pelimpahan wewenang pemerintah daerah kepada camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di nagari untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini hanya terdapat satu sub kegiatan yaitu :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Merupakan sub kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat masyarakat dan partisipasinya dalam forum perencanaan pembangunan nagari melalui musrenbang nagari dan kecamatan

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan TP PKK Kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Merupakan program yang berisikan kegiatan yang bersifat umum dimana terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Merupakan kegiatan yang dilimpahkan oleh kepala daerah kepada camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Merupakan sub kegiatan yang berisikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan upacara hari besar nasional seperti upacara 17 Agustus, peringatan hari pahlawan, dsb.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi forum pimpinan di kecamatan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di nagari.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.34 berikut ini:



Tabel T-C. 34

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LUNANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LUNANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	DPA 2025 (Rp.)	Pergeseran 2025 (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
KECAMATAN LUNANG					1.834.189.154	1.699.452.317					2.057.200.000
UNSUR KEWILAYAHAN					1.834.189.154	1.699.452.317					2.057.200.000
KECAMATAN					1.834.189.154	1.699.452.317					2.057.200.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.736.889.154	1.620.654.317					1.839.200.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0					37.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0	0					21.000.000
	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	21.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0					16.000.000
	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	16.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.277.869.154	1.288.354.154					1.346.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.234.189.154	1.234.189.154					1.300.000.000
	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	10 Orang/ bulan	1.234.189.154	1.234.189.154	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ bulan	1.300.000.000



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						43.680.000	54.165.000				46.000.000
-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	43.680.000	54.165.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						43.680.000	43.680.000				305.200.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.080.585	1.080.585				14.000.000
-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	10 Paket	1.080.585	1.080.585	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.967.440	32.967.440				21.000.000
-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	2 Paket	32.967.440	32.967.440	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.240.300	15.240.300				37.000.000
-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Paket	15.240.300	15.240.300	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4.510.000	4.510.000				16.000.000
-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	4.510.000	4.510.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0	0				1.200.000
-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	



Fasilitas Kunjungan Tamu						0	0				41.000.000
-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						270.213.675	270.213.675				175.000.000
-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	270.213.675	143.489.837	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.700.000	62.700.000				73.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.600.000	12.600.000				12.000.000
-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.600.000	12.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.100.000	50.100.000				61.000.000
-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.100.000	50.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72.308.000	72.312.001				78.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.700.000	38.704.001				31.000.000
-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	3 Unit	38.700.000	38.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	31.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.400.000	7.400.000				13.000.000



-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	6 Unit	7.400.000	7.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	13.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					26.208.000	26.208.000				34.000.000
-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	2 Unit	26.208.000	26.208.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	34.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22.500.000	19.068.000				60.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					22.500.000	19.068.000				60.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					22.500.000	19.068.000				60.000.000
-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	22.500.000	19.068.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	60.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					33.860.000	19.560.000				76.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					33.860.000	19.560.000				76.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5.150.000	5.150.000				21.000.000
-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.150.000	5.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					28.710.000	14.410.000				55.000.000
-	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	28.710.000	14.410.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					40.940.000	40.170.000				61.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					40.940.000	40.170.000				61.000.000



Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						34.590.000	34.590.000				40.000.000
-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	34.590.000	34.590.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	40.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						6.350.000	5.580.000				21.000.000
-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6.350.000	5.580.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	21.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0	0				21.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0	0				21.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						0	0				21.000.000
-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	- Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	21.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Lunang kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Lunang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana Tabel T-C. 35 berikut :



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
KECAMATAN LUNANG**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come dan Kegiatan Output)	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Unit Kerja OPD Penanggung jawab
					Target	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih, transparan, Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12 bulan	1.810.959.113	1.736.889.154	1.633.254.317	Kec. Lunang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	35.000.000	0	0	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	20.000.000	0	0	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	15.000.000	0	0	Kec. Lunang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan kantor	12 bulan	1.335.759.113	1.277.869.154	1.288.354.154	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 orang	1.290.159.113	1.234.189.154	1.234.189.154	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	45.600.000	43.680.000	54.165.000	Kec. Lunang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum kantor	12 bulan	295.200.000	324.012.000	223.488.162	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	10 paket	13.000.000	1.080.585	1.080.585	Kec. Lunang



			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan					
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000	32.967.440	32.967.440	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	36.000.000	15.240.300	15.240.300	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	15.000.000	4.510.000	4.510.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.200.000	0	0	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	40.000.000	0	0	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	170.000.000	270.213.675	169.689.837	Kec. Lunang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	70.000.000	62.700.000	59.100.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	10.000.000	12.600.000	9.000.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	60.000.000	50.100.000	50.100.000	Kec. Lunang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	75.000.000	72.308.000	62.312.001	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	30.000.000	38.700.000	28.704.100	Kec. Lunang



			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	12.000.000	7.400.000	7.400.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara.direhabilitasi	2 unit	33.000.000	26.208.000	26.208.000	Kec. Lunang
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Tepat Waktu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	85 %	55.000.000	22.500.000	6.500.000	Kec. Lunang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 bulan	55.000.000	22.500.000	6.500.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	55.000.000	22.500.000	6.500.000	Kec. Lunang
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Tepat Waktu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	100 %	72.000.000	33.860.000	19.560.000	Kec. Lunang
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	20.000.000	33.860.000	19.560.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang mengikiti kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	20.000.000	5.150.000	5.150.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	52.000.000	28.710.00	14.410.000	Kec. Lunang



			Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
Terwujudnya Pemerintahan Daerah yg Bersih, transparan, Akuntabel & Profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	58.000.000	40.940.000	40.170.000	Kec. Lunang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	58.000.000	40.940.000	40.170.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah org yg mengikuti pembinaan persatuan & kesatuan bangsa	100 orang	38.000.000	34.590.000	34.590.000	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	20.000.000	6.350.000	5.580.000	Kec. Lunang
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang Pengelolaannya Baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	10 nagari	20.000.000	0	0	Kec. Lunang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	12 bulan	20.000.000	0	0	Kec. Lunang
			Sub Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dlm rangka administrasi tata pemerintahan desa	12 dokumen	20.000.000	0	0	Kec. Lunang
JUMLAH						2.015.959.113	1.834.189.154	1.699.452.317	

BAB V PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Lunang, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui Perubahan Anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI



LAMPIRAN

1. Pergeseran Anggaran Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret 2025/ Laporan Realisasi Keuangan s/d Bulan Maret 2025
3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2025